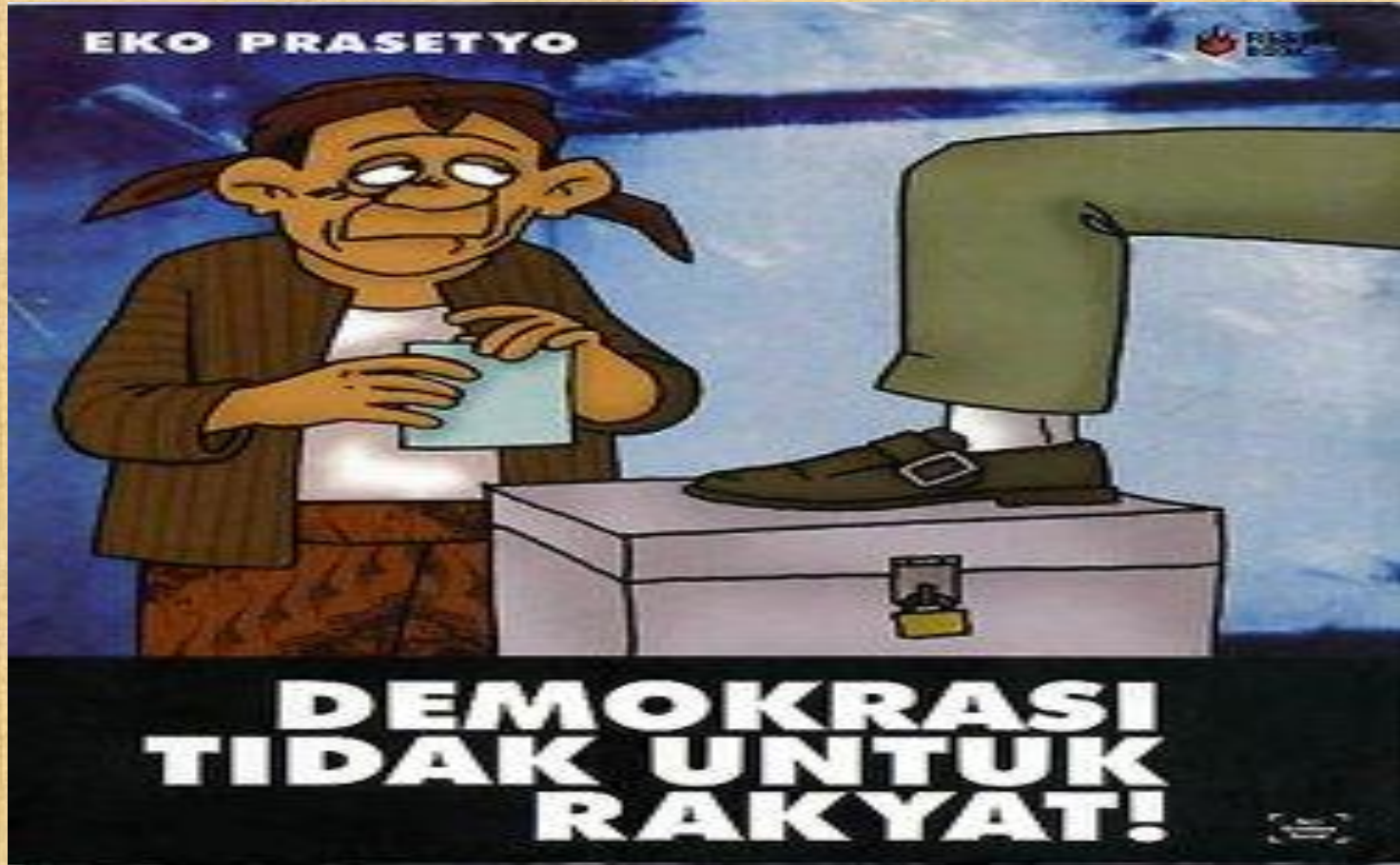


# DEMOKRASI TIDAK UNTUK RAKYAT





Oleh :

Bahrin Rafiudin Ahimsah (08230057)

Mujamin (08230007)

Muhammad Herman (08230036)

M.Syaifullah Muzaka (08230074)

# Imajiasi Paham Demokrasi

## Sebut saja teori Demokrasi

- Para penguasa telah berhenti memerintah , tetapi kaum budak tetap menjadi budak (Lutz Niethammer)
- Musuh paling berbahaya bagi kebenaran dan kebebasan adalah mayoritas yang kompak (Henrik Ibsen)

Machiaveli dalam karyanya yang berjudul Discorsi (Politik Kerakyatan), membagi 3 pola kekuasaan yang menjunjung kepentingan rakyat, yaitu :

- Kerajaan (principato)
- Dewan perwakilan kalangan atas atau Aristokrasi (ottimati)
- Partisipasi seluruh rakyat atau Demokrasi (popolare)

Lerry Diamond, Juan Linz, dan Seymour Martin menyusun kriteria untuk sistem politik yang demokratis, yaitu:

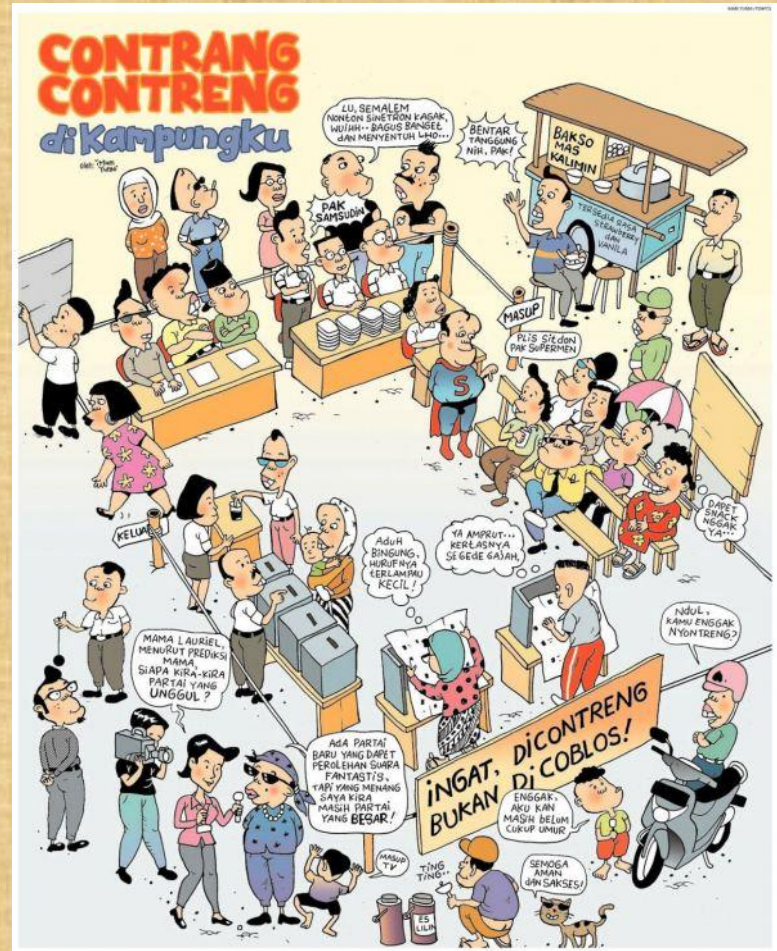
- Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok masyarakat.
- Partisipasi politik yang melibatkan semua warga, dan.
- Tingkat kebebasan sipil dan politik yang memadai.

John lock memisahkan aspek Legislatif (pembuatan undang-undang dan pelaksanaan hukum) dan Yudikatif (pelaksanaan dari undang-undang dan hukum) . Gagasan ini kemudian diperluas oleh Montesquie yang memisahkan 3 aspek kekuasaan, yakni:

- Kekuasaan Legislatif
- Kekuasaan Yudikatif
- Kekuasaan Eksekutif

Ajaran ini dinamai dengan sistem Tria Politica yang menjadi kaidah dalam penerapan sistem politik modern.

David Held mendefinisikan Demokrasi sampai dalam artian penegakan prinsip dasar otonomi individu, dimana orang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya yaitu, mereka harus memperoleh hak yang sama dan karena itu kewajiban juga harus sama dalam suatu kerangka pikir yang menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia untuk mereka, asalkan menyebarkan kerangka pikir ini untuk meniadakan hak-hak orang



Dalam konteks ini Demokrasi memerlukan civil society. Civil Society yang dimaksudkan bercirikan antara lain:

- Kesukarelaan (voluntary)
- Keswasembadaan (self- generating)
- Keswadayaan (self- supporting)
- Kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan
- Keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang ditakuti oleh warganya.

Carl Schmitt yang melakukan kritik atas diterapkannya demokrasi liberal, suatu konsep politik yang bertolak dari fakta bahwa politik telah diciutkan pengertiannya menjadi sekedar suatu kegiatan instrumental untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi yang mementingkan diri sendiri.

# Demokrasi di Tangan Gerombolan Bandit

## Mengapa bandit berkuasa?

Olle Torquist → “Demokrasi kaum penjahat” :

Jikalau demokrasi yang terjadi hanya secara formal dalam artian tidak diiringi oleh partisipasi yang sesungguhnya dari rakyat maka hasil yang mungkin terlihat merupakan “demokrasi kaum penjahat” yang didukung oleh militer yang didalamnya pejabat-pejabat disemua tingkat mampu bertahan, menarik sekutu militer dan pengusaha, mengkoopsi beberapa pembangkang, serta melakukan mobilisasi dukungan masa melalui populisme Islam dan semua ini akan berlangsung sebelum para aktivis demokrasi sejati serta rakyat kebanyakan mampu mengorganisasikan diri.



James T.Siegel menyatakan buat negara ancaman adalah sebuah daya tarik. Secara fantastis Orde Baru mulai mempraktekan kekerasan didepan mata para penguasa yang konon mengibarkan diri sebagai negara demokrasi.



## **Aksi bandit menjarah uang & kedaulatan rakyat :**

Prestasi besar Orde Baru dalam mengembangkan praktek preman adalah kebijakan penembakan misterius. Nico G. Schulte Nordholt menganalisis kalau kebijakan penembakan misterius ini untuk mencapai sejumlah tujuan, yaitu:

- Dukungan luar biasa masyarakat atas penumpasan para penjahat
- Dengan memusanakan ratusan penjahat maka saksi-saksi potensial bagi persoalan-persoalan yang bersifat politis-pun akan hilang
- Lawan-lawan potensial bagi keperesidenan diperingatkan untuk menghindari masalah jika terjadi kekosongan kekuasaan
- Strategi intimidasi untuk semua kelompok oposisi

*Eko prasetyo (Domokrasi Tidak Untuk Rakyat : Hal. 49)*

## **Wilayah Operasi Para Bandit :**

- Peraktek pencurian uang dengan memakai orang dalam bukan saja makin mewabah tapi menjadi kegemaran. Tidak hanya di Bank melainkan lembaga seperti Bulog tak luput dari jarahan para maling.
- Penyelundupan atas bahan-bahan makanan pokok serta sumber daya alam. Sindikat penyelundupan ini bekerja dengan payung politik serta keamanan yang maksimal sehingga leluasa dalam menjarah harta rakyat.
- Bisnis perdagangan manusia yang jauh lebih menguntungkan. Bisnis ini dulit dijaring oleh hukum selain persoalan perangkat juga keterlibatan aparat banyak sektor bisnis semacam ini.
- Bisnis jual beli suara yang dipenuhi oleh para cukong yang menyediakan ratusan juta dana untuk seorang kandidat. Artinya demokrasi disini buakn pertarungan antar ideologi melainkan para cukong yang menjadi bandar duit masing-masing kandidat. Ini mirip dengan sabung ayam.

*Eko prasetyo (Domokrasi Tidak Untuk Rakyat : Hal. 50)*

# Oposisi Yang Loyo

Oposisi adalah elemen alternatif dari kekuatan demokrasi. Melalui oposisi sistem demokrasi memiliki pertanggung-jawaban sekaligus mandat yang jelas. Kekuasaan hasil dari sistem demokrasi harus dikontrol oleh kekuatan oposisi.



*Eko prasetyo (Domokrasi Tidak Untuk Rakyat : hal .63)*

## **Hancurnya kekuatan oposisi:**

- Peran edukasi politik diabaikan sama sekali oleh partai politik. Yang terjadi bukan edukasi melainkan mobilisasi menjelang pemilu.
- Kurang maksimal dalam meng-agregasi kepentingan-kepentingan yang ada di arus bawah.
- Kurangnya pemberian sanksi pada anggota yang terbukti berkhianat pada anamat rakyat.
- Dukungan basis pada partai hanya diukur dari sejauh mana mereka memberikan suara menjelang pemilu atas seberapa banyak mereka hadir dalam setiap musim kampanye.
- Partai tidak memiliki “kejelasan ideologi”
- Watak fasisme yang menjadi bagian inti dari partai politik.

## **Kinerja Komnas HAM Digugat:**

- Pada tahun 2003 terjadi lebih dari 90 kasus kekerasan, tetapi hanya 7 kasus yang masuk ke pengadilan, itupun tanpa melalui Komnas HAM
- Presiden tidak cukup memberi dukungan terhadap Komnas HAM
- Komnas HAM lebih memprioritaskan upaya normatif, seperti Komnas HAM yang mengajukan RUU Komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta perubahan UU No 26/2000

(sumber *Kompas* 29-7-2004)

## **Diktatorisme & Sindikat Modal Ancaman “baru” Terhadap Oposisi:**

- Milisi bersenjata yang dikoordinir oleh kekuatan politik yang oligarkhis
- Ekspansi yang dikelola sepenuhnya oleh institusi modal sehingga membekuk kekuatan oposisi yang tidak memiliki posisi tawar dan loyalitas pada basis masa yang ada dibawah
- Rezim diktator yang bersatu dengan kekuatan modal secara berangsur-angsur membentuk kekuasaan yang konkrit

# Demokrasi Disini Membuang Kedaulatan Rakyat

- Peran rakyat miskin semakin tertinggal. Sektor layanan publik memang makin banyak didirikan, seperti sekolah maupun rumah sakit. Akan tetapi institusi ini makin sulit diakses karena harganya jauh dari jangkauan rakyat.
- Oligarkhi tidak tumbuh dalam sektor kekuasaan politik melainkan berada dalam sektor-sektor ekonomi.
- Problem rakyat kian menajuh dari penyelesaian dan selalu dibaca dalam konteks prosedural. Muncul berbagai pendidikan yang melatih aparat untuk memberikan pelayanan tanpa deskriminasi dan selalu memperhatikan aspek-aspek HAM.



## **Kemana Demokrasi kemudian berpihak?**

- *Pertama*, kekuatan modal yang selama ini memberi ongkos besar-besaran bagi munculnya pengetahuan baru tentang demokrasi.
- *Kedua*, lembaga keuangan internasional yang selama ini menjadi operator penilai sah-tidaknya demokrasi yang dianut. cukup dengan kurs mata uang maka legitimasi kekuasaan dijamin dengan mahir.
- *Ketiga*, Para penguasa yang menjadi kaki tangan bagi dua kekuatan sebelumnya. Merasa memenangkan prosedur demokrasi, mereka menjadi “boneka” baik yang mampu memenuhi selera pasar.

# Rebut Demokrasi Dari Tangan Bandit

## Langkah- Langkah yang harus ditempuh:

- Pendidikan adalah jalan utama memperkuat kesadaran tentang bagaimana implementasi demokrasi kerakyatan itu dibentuk.
- Membentuk organ gerakan yang mempunyai visi dan metode yang sesuai dengan syarat-syarat sosial dan kultural.
- Mengambil peran advokasi dan pembelaan untuk masuk sekaligus memperebut aspek legalitas.
- Media mengambil fungsi yang strategis, khususnya dalam memperkuat pencitraan sekaligus pengungkapan informasi yang akurat mengenai kondisi mengenaskan rakyat.
- Kaum pergerakan waktunya untuk mengembangkan jaringan antar kelompok lintas etnis maupun agama. Jaringan ini bisa efektif jika dilandasi oleh tradisi keterbukaan, solidaritas dan persamaan.

## Lanjutan →

- Waktunya gerakan untuk mengembangkan tradisi yang berbasis pada produksi. Logistik gerakan yang selama ini menjadi kritik terbesar dari lapisan rakyat yang harus diselesaikan.
- Memperkuat peran gerakan sebagai pelindung masyarakat lemah Perlu dikembangkan tradisi kaderisasi yang berbasis pada massa rakyat yang riil.
- Melakukan pendataan dan pendokumentasian semua kegiatan yang berjalan sehingga menarik publik untuk membacanya.
- Menjalankan dan memutuskan penggalangan aksi massa dengan turun ke jalan.

## **Praktek yang menghambat proses demokrasi:**

- Pragmatisme politik → keputusan-keputusan politik diambil dalam jangka pendek. Contohnya pemulihan ekonomi dengan pemotongan subsidi.
- Feodalisme kekuasaan → pelayanan birokrasi yang masih diskriminatif. Contohnya dalam hal pelayanan publik yg kental akan unsur Nepotisme dan Kolusi.
- Mistifikasi politik → penyimpangan dari permasalahan politik yang sebenarnya. Mistifikasi inilah yang membuat sejumlah program partau politik beorientasi pada bagaimana mengamankan kepengurusan ketimbang menjalankan kontrol.

- Kapitalisme kaum penguasa → dengan energi modal yang besar belakangan ini, kekuasaan memiliki daya tahan dan kemampuan untuk melumpuhkan berbagai upaya dari kaum oposisi.
- Liberalisasi agenda masyarakat sipil → liberalisasi ini terutama digunakan untuk memangkas sistem kekuasaan yang selalu memakai prosedur dan teknik yang korup.
- Fragmentasi Gerakan → perpecahan ditubuh gerakan menjadi bagian menjadi bagian yang melekat erat dari proses pemerkuatan demokrasi.
- Rendahnya kultur intelektual → rendahnya kultur ini bisa diidentifikasi dari sedikitnya jurnal, buku, maupun monograf lapangan yang dihasilkan oleh kalangan pergerakan.

**TERIMA KASIH**

